

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang paling mendasar. Hal ini memiliki makna lain bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan perlu diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam pasal 15 yang mengamanatkan bahwa: “Pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial atau yang memiliki potensi-potensi kecerdasan dan bakat istimewa, diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus.”

Wujud dari adanya aturan tersebut adalah mulai diterapkannya sistem pendidikan inklusif. Peraturan tersebut juga praktis mengubah paradigma pendidikan Indonesia yang tadinya terpisah mulai berangsur-angsur inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya inovasi dan strategi untuk mendekatkan dan memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, secara lebih mendasar, pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai suatu produk reformasi dalam lingkup pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, serta perluasan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Meskipun begitu, jumlah sekolah inklusif di Indonesia menurut data pokok pendidikan tahun 2019 berjumlah 29.317 sekolah. Di Jawa Tengah sendiri sekolah inklusif baru berjumlah 519 sekolah yang terdiri atas 472 sekolah berstatus negeri dan sekolah berstatus swasta berjumlah 47 sekolah. Kabupaten Boyolali sendiri yang dijadikan lokus penelitian menurut data terakhir yakni tahun 2012 memiliki 80 sekolah inklusif dan SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali adalah satu diantaranya. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif di Boyolali sendiri pemerintah kabupaten bahkan membuat payung khusus dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali No 54/2012

tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Terbitnya perbup tersebut praktis mengakomodasi pertumbuhan jumlah sekolah penyelenggara inklusif yang tadinya hanya 36 sekolah pada 2005 menjadi 80 pada 2012 (Ryanthie, 2013). Untuk bahan analisis, nantinya yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa sebagai pengganti Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali No 54/2012 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang tidak dapat ditemukan dokumennya.

Perkembangan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang signifikan di Kabupaten Boyolali menarik penulis untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan inklusif yang telah diselenggarakan dalam lingkup manajemen publik. Penulis sendiri akan melihat tiga permasalahan utama yang sering terjadi dalam pendidikan inklusif, yakni: kurikulum, ketersediaan guru pembimbing khusus, dan sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen tersebut, penulis akan memfokuskan melakukan penelitian tiga aspek utama dalam manajemen pendidikan inklusif, yakni kurikulum, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana.

Kurikulum menurut Ilahi (2013:167) merupakan faktor penentu saat merencanakan manajemen pendidikan inklusif. Arah dan tujuan pendidikan tidak bisa tercapai tanpa disusunnya suatu kurikulum. Penyediaan fasilitas siswa berkebutuhan khusus yang digabungkan dengan siswa biasa tidak bisa dipungkiri lagi sekolah inklusif memerlukan kurikulum khusus dalam menjalankan pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif yang disusun tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan kurikulum sekolah reguler, hanya saja kurikulum yang berada di sekolah inklusif harus dilakukan improvisasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Improvisasi dilakukan bertujuan supaya penggunaan kurikulum di sekolah inklusif tersebut sesuai dapat dilakukan langkah pemilahan. Pertama, anak dengan kemampuan akademik yang homogen disiapkan menggunakan kurikulum terpadu maupun kurikulum normal. Kedua, apabila terdapat anak yang memiliki kemampuan sedang diberikan kurikulum fungsional/vokasional. Ketiga, anak dengan kemampuan rendah disiapkan kurikulum bina diri. Diluar pemilahan tersebut, perlu juga disiapkan kurikulum khusus untuk setiap ABK sebelum memulai kegiatan akademik. Sekolah juga perlu mempersiapkan regulasi teknis pembelajaran untuk

memudahkan proses belajar mengajar seperti sistem evaluasi, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Kustawan, 2013: 95).

Tabel 1.1

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Dilihat Dari Kecacatan

No.	Kecacatan	Pengembangan yang Dibutuhkan
1.	Tunanetra	a. Membaca huruf braille; b. Mobilitas; c. Motoris.
2.	Tunarungu	a. Kemampuan <i>lip reading</i> ; b. Bina bicara; c. Bina persepsi bunyi dan irama.
3.	Tunagrahita	a. Pengembangan tata bunyi dan kosakata; b. Keterampilan mengelompokkan dan membedakan obyek; c. Mengembangkan perhatian dan konsentrasi; d. Mengembangkan memori.
4.	Kesulitan Belajar (<i>Slow Learner</i>)	a. Penyesuaian materi pelajaran sesuai hambatan; b. Menggunakan media khusus.

Sumber: Wahyuno, Ruminiati, dan Sutrisno (2014: 77-84)

Adanya siswa berkebutuhan khusus di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali mendorong sekolah untuk memenuhi kebutuhan penyusunan kurikulum khusus diluar kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali sendiri hanya ada siswa dengan kecacatan kesulitan belajar (*slow learner*). Dengan adanya siswa berkebutuhan khusus yang kesulitan belajar tersebut SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali seharusnya tidak ada kesulitan dalam membuat kurikulum khusus. Faktanya, penulis melihat kurikulum khusus yang seharusnya dibuat justru sama sekali tidak disusun. Dengan tidak adanya kurikulum khusus praktis akan berdampak pada siswa berkebutuhan khusus.

Komponen berikutnya yang akan diteliti dilihat dari tenaga pendidik dalam hal ini guru. Dalam sekolah inklusif guru pembimbing khusus (GPK) merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Guru pembimbing khusus menurut Kustawan (2013: 129) merupakan guru yang memiliki kualifikasi akademik yang berasal dari program studi tertentu guna memberikan bimbingan kepada guru di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kualifikasi khusus guru pembimbing khusus yang dibutuhkan memiliki tugas antara lain: (1) membuat program pembimbingan bagi guru secara umum; (2) melakukan monitoring dan evaluasi pembimbingan guru lain; (3) memberikan layanan berupa intervensi dan advokasi kepada peserta didik; dan (4) memberikan bantuan baik dalam pengembangan kurikulum, media pembelajaran, dan sarana prasarana.

Pada faktanya, penulis melihat guru pembimbing khusus yang sejatinya sangat penting tersebut tidak terdapat dalam sekolah inklusif. Padahal guru pembimbing khusus merupakan pilar dalam penyelenggaraan sekolah inklusif dan memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan, dan keterampilan dalam memahami siswa ABK. Dengan tidak adanya guru pembimbing khusus praktis terdapat kekosongan dalam posisi tersebut. Dengan melimpahkan seluruh tugas kepada guru selain guru pembimbing khusus akan memberikan dampak tidak berjalannya sistem pendidikan inklusif dalam sekolah tersebut.

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana fisik harus dibedakan dengan PDBK agar lebih mudah dalam mengakses sarana dan prasarana yang disediakan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang “Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB, sekolah perlu memperhatikan aksesibilitas non fisik dan aksesibilitas fisik” (Kustawan, 2013: 137).

Aksesibilitas non fisik, dapat berupa aturan atau prosedur, harus disediakan untuk memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi penuh dalam kegiatan pendidikan atau sekolah, adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan layanan administrasi. Jenis pelayanan dari aksesibilitas ini dapat berupa: suara, bunyi, dan tulisan yang melekat dengan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik dapat dikatakan sebagai fasilitas yang memudahkan setiap orang agar dapat masuk ataupun keluar pada suatu fasilitas seperti bangunan atau area tersebut. Standar ukuran aksesibilitas fisik minimal 160 cm untuk setiap fasilitas fisik sekolah seperti jalan, koridor sekolah dan kelas.

Sayangnya, di lapangan sekolah tidak menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memudahkan PDBK. Bahkan media pembelajaran untuk PDBK pun tidak disediakan. Artinya, sarana dan prasarana untuk siswa ABK atau PDBK masih terabaikan. Hal tersebut tergambar dalam foto yang penulis lampirkan dibawah ini.

Gambar 1.1

Koridor SMPN 4 Mojosongo Boyolali



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.2

Toilet SMPN 4 Mojosongo Boyolali



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Manajemen pendidikan inklusif yang akan dianalisis penulis nantinya akan dipadukan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat yang mewarnai keberjalanan manajemen pendidikan inklusif tersebut. Untuk mencari faktor pendukung dan penghambat tersebut penulis akan mencari dengan menganalisis menggunakan unsur-unsur manajemen. Sebagaimana disebutkan oleh John Phiffner dan Robert Presthus (dalam Rohman, 2018: 15) menyebutkan lima unsur manajemen yang utama, yakni: manusia (*men*); uang (*money*); material (*materials*); mesin (*machine*); dan metode (*method*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa pertanyaan dapat diidentifikasi sehingga mereka tertarik dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali**” adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada pedoman teknis penyesuaian kurikulum yang baku yang disusun sekolah.
2. Tidak tersedianya guru pembimbing khusus (GPK).
3. Tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang proses manajemen pendidikan inklusif.
2. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan masukan yang sesuai terhadap manajemen pendidikan inklusif. Terutama kurikulum yang relevan guna menunjang interaksi antara guru dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Bagi Universitas
Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro secara khusus yang akan mengambil tema penelitian pendidikan inklusif.
4. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah informasi yang berguna bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran bahwa peran masyarakat sangat penting dalam pendidikan inklusif.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

Judul Jurnal	Penulis	Indikator	Tujuan	Temuan
<p><i>Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di SDN Se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban</i></p>	<p>Ina Agustin, (2019)</p>	<p>Komponen Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Pendidik (Guru) b. Peserta Didik c. Manajemen Sekolah d. Kurikulum e. Proses Pembelajaran f. Sarana Prasarana g. Kerjasama 	<p>Mengetahui permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui observasi pada setiap komponennya.</p>	<p>Temuan yang didapatkan adalah permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah terkait dengan komponen tenaga pendidik yang terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing khusus (GURU PEMBIMBING KHUSUS), peserta didik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, kerjasama, dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak misalnya dengan pemerintah atau dinas</p>

				terkait dan dengan orang tua wali murid.
<i>Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak</i>	Supriatini, Muhdi, Yovitha Yuliejantiningasih (2019)	Komponen Pembahasan : a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi	Fokus penelitian ingin mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak dan sub fokusnya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi.	Dari sisi komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terdiri dari komunikasi dengan pendidik yaitu guru ABK dan tenaga kependidikan yaitu staf tata usaha dan psikolog. Komunikasi eksternal diantaranya adalah dengan pihak pihak luar seperti UPTD DIKBUD Kecamatan Demak, Orang tua siswa, Komite Sekolah. Komunikasi dengan interen maupun eksteran ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk

				<p>koordinasi pelaksanaan diberbagai bentuk kegiatan pendidikan anak. Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak meliputi tiga hal yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Sumber daya manusia terdiri dari guru pendamping ABK. Guru mata pelajaran dan psikolog</p>
<p><i>Kajian Manajemen Pemerintahan Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Tingkat Smp Negeri Kota Semarang</i></p>	<p>Sonia Permatasari (2019)</p>	<p>Indikator Manajemen yang digunakan dalam Pendidikan Inklusif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan 	<p>Melakukan analisis terhadap manajemen sekolah inklusif menggunakan pendekatan manajemen dari perencanaan hingga pengawasan.</p>	<p>Ada beberapa hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Pertama dari guru reguler karena tidak semuanya sadar dan menerima bahwa terdapat siswa difabel yang harus diampunya, karena itu membutuhkan kesabaran dan perlakuan yang tepat</p>

				<p>dalam mengajar peserta didik difabel. Tak jarang pula guru melakukan diskriminasi entah secara sadar maupun tidak. Sama halnya dengan teman sebaya normal pada peserta didik difabel yang melakukan bully pada anak difabel.</p> <p>Kedua berupa sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai sekolah inklusi dan terdapat peserta didik difabel, namu belum terdapat GURU PEMBIMBING KHUSUS yang seharusnya ada di tiap sekolah inklusi.</p>
<p><i>Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Mindfulness Teaching</i></p>	<p>Sarah Emmanuel Haryono, Henni Anggraini, Melik Budiarti (2019)</p>	<p>Prinsip yang harus dipahami didalam mindfulness teaching didalam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yang harus</p>	<p>Didalam artikel ini, penulis ingin mengkaji mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan</p>	<p>Mengimplementasikan mindfulness teaching untuk ABK tidaklah mudah, karena membutuhkan upaya dan daya yang cukup besar dari</p>

		<p>dilakukan oleh seorang guru:</p> <p>a. <i>Compassion and Non-judgment</i></p> <p>b. <i>Responsive, Not Reactive</i></p> <p>c. <i>Teacher Self-Knowledge and Reflection</i></p> <p>d. <i>Mindful Interpretation of Student Behavior</i></p>	<p>pendekatan mindfulness teaching, yang merupakan tantangan bagi para pendidik. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang menggunakan pendekatan mindfulness teaching diharapkan akan dapat membantu mengoptimalkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus.</p>	<p>sang guru, tetapi jika guru berupaya mengimplementasikan didalam proses pembelajaran akan memberikan dampak yang luar biasa didalam upaya optimalisasi pada anak berkebutuhan khusus .</p>
<p><i>Impact of Teacher Education on Pre-Service Regular School Teachers' Attitudes, Intentions, Concerns and Self-Efficacy about Inclusive Education in South Korea</i></p>	<p>Jia Shong, Umesh Sharma, Hayoung Choi (2019)</p>	<p>Komponen dalam menilai calon guru dalam pelatihannya:</p> <p>a. Sikap</p> <p>b. Niat</p> <p>c. Perhatian</p> <p>d. Efikasi Diri</p> <p>e. Persiapan dalam menghadapi sekolah inklusif</p>	<p>Meneliti dampak pelatihan menghadapi pendidikan inklusif secara terbatas dalam konteks Korea Selatan.</p>	<p>Pendidikan guru untuk menghadapi pendidikan inklusif harus menyediakan pelatihan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang terkait guna menghadapi kesulitan yang akan dihadapi guru ketika mengajar di sekolah inklusif.</p>

<p><i>Understanding Teachers' Attitudes Towards The Inclusion of Children With Disabilities in Inclusive Schools Using Mixed Methods: The Case of Trinidad</i></p>	<p>Bephyer Parey (2019)</p>	<p>Komponen dalam membandingkan guru sekolah dasar dengan guru sekolah menengah dalam menghadapi ABK:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sikap b. Perhatian c. Persepsi d. Efikasi Diri 	<p>Memahami sikap guru sekolah dasar dan sekolah menengah terhadap dimasukkannya ABK di sekolah inklusif di Trinidad menggunakan metode campuran.</p>	<p>Terdapat ambivalensi pada metode kuantitatif. Sementara pada metode kualitatif justru menunjukkan dukungan pada pendidikan inklusif.</p>
<p><i>Which Inclusive Teaching Tasks Represent The Highest Level of Teacher Efficacy in Primary and Secondary Schools?</i></p>	<p>Chih Nuo Grace Chao, Francisco Tsz Tsun Lai, Mingxia Ji, Sing Kai Lo, Kuen Fung Sin (2019)</p>	<p>Komponen efikasi diri guru dalam menghadapi pendidikan inklusif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi b. Mengelola perilaku c. Melaksanakan instruksi 	<p>Bertujuan memperoleh kesesuaian antar aspek pada guru dalam pengajaran pendidikan inklusif.</p>	<p>Dari tiga komponen tersebut, terdapat temuan dalam kolaborasi guru mendapat nilai yang paling tinggi, sebaliknya dalam perilaku guru mendapat nilai yang rendah dalam komponen efikasi diri tersebut.</p>

<p><i>Deliberative Decision-making in Teacher Education</i></p>	<p>Kiel. F. Harrel (2019)</p>	<p>Komponen pengambilan keputusan: a. Kurikulum b. Mendidik secara demokratis</p>	<p>Meneliti pengambilan keputusan yang disengaja sebagai strategi untuk pendidikan guru yang demokratis dengan mengawasi peran pendidik guru sebagai fasilitator dalam proses tersebut. Hal ini menganalisis bagaimana tindakan fasilitator dapat mendukung atau merongrong kekuatan peserta didik untuk berunding atas keputusan yang bermakna.</p>	<p>Ketika fasilitator mempromosikan proses musyawarah dan menarik perhatian pada masalah yang potensial daripada menyelesaikannya untuk para peserta didik, hal tersebut tentu saja memiliki potensi untuk mempengaruhi pemahaman guru tentang hubungan antara demokrasi dan pendidikan. Dengan berunding bersama-sama tentang bagaimana mereka akan belajar selama pelajaran, guru mendapat keuntungan wawasan pengalaman.</p>
---	-------------------------------	---	--	---

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Konsep dan Paradigma Administrasi Publik

Pada dasarnya, administrasi publik bertujuan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dan publik, meningkatkan tanggung jawab kebijakan terhadap integritas publik, dan melembagakan praktik manajemen agar terbiasa dengan implementasi kebijakan yang efektif, efisien dan wajar. Peran administrasi publik di negara tersebut sangat penting.

Felix dan Lloyd Nigro (Syafiie, 2006:24) memberikan beberapa pengertian dari administrasi publik, di antaranya adalah sinergi dari beberapa kelompok dalam lingkungan pemerintahan, memberikan penjelasan dari tiga komponen utama dalam pemerintah yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif. Selain itu administrasi publik berperan penting dalam membentuk rumusan kebijakan dan merupakan bagian dari proses politik, memiliki kaitan dengan korporasi dan perorangan dalam melayani masyarakat, serta memiliki pengertian yang berbeda dengan administrasi perseorangan.

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengatur urusan kemasyarakatan dan menjalankan berbagai tugas. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat melalui perbaikan atau penyempurnaan, khususnya dalam bidang organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta keuangan sebagaimana dijelaskan Chandler dan Plano Plano (Keban, 2014: 100).

Dari pengertian-pengertian administrasi publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari kerjasama dua atau lebih orang dalam suatu lingkungan publik yang meliputi tiga departemen yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mengembangkan kebijakan untuk mencapai tujuan dengan melihat sumber daya yang ada. Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu yang terus berkembang dalam pelaksanaannya. Perkembangan ilmu administrasi publik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan tuntutan sesuai kebutuhan, sehingga berkembanglah beberapa paradigma dalam administrasi publik. Ini membuktikan bahwa administrasi publik bukanlah ilmu yang statis namun senantiasa berkembang.

1.5.3 Manajemen Publik

1.5.3.1 Definisi Manajemen Publik

Istilah manajemen publik tidak berbeda jauh secara makna dari pengertian manajemen secara umum. Secara bahasa menurut Usman (2008: 3) manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Dari dua kata tersebut menjadi kata *managere* yang kemudian diadopsi dalam Bahasa Inggris menjadi *manager* yang bertugas melakukan tugas manajemen. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pengelolaan.

Secara istilah manajemen menurut Wijayanti (dalam Rohman, 2018: 11) melihat manajemen merupakan suatu proses yang saling terkait satu sama lain. Proses tersebut adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar proses tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2006: 49) manajemen merupakan suatu proses pengendalian serta penggunaan semua sumber daya yang tersedia menurut perencanaan tujuanyang sudah disusun agar tercapai tujuan tersebut. Sejalan dengan Atmosudirdjo, Nugroho (dalam Rohman, 2018: 13) berpendapat pengendalian dapat dihubungkan dalam konteks pembahasan kebijakan publik. Dalam konteksnya, pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan pemberian hukuman (*punishment*).

Manajemen publik termasuk ke dalam profesi yang baru, namun memiliki akar beruoa pendekatan normative. Woodrow Wilson (Keban, 2014: 100) mengungkapkan bahwa manajemen publik mengacu pada manajemen instansi pemerintah yang dirumuskan empat prinsip dasar, yaitu pemerintah sebagai organisasi utama, fungsi administrasi sebagai fokus utama, prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kapasitas administrasi, dan hukum komparatif sebagai pengaturan utama pengembangan administrasi publik.

Pada pengertian-pengertian yang telah dijelaskan tersebut, manajemen publik dapat dimaknai sebagai alat, teknik, dan ilmu yang berfokus pada manajerial dan penataan atau pemrograman sebuah ide atau kebijakan dalam program dan/atau tindakan. Selain itu manajemen publik mengalami perkembangan paradigma, pelaksanaan dari ilmu tersebut dilaksanakan pada organisasi publik dalam penyelenggaraan birokrasi. Pengelolaan administrasi birokrasi administrasi publik juga mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga membutuhkan lembaga pemerintah yang dapat berjalan secara efektif.

1.5.3.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut Mee (dalam Rohman, 2018: 26) manajemen memiliki empat fungsi yang digambarkan secara umum sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam kelembagaan, manajer diharapkan dapat menguasai fungsi-fungsi tersebut agar memaksimalkan hasil manajemen.

a. Perencanaan

Fungsi yang paling dasar dalam manajemen adalah perencanaan. Perencanaan harus dilakukan pertama kali sebelum menjalankan sebuah tujuan. Dalam membuat suatu perencanaan, diperlukan tahapan-tahapan agar tujuan organisasi tercapai. Menurut Atoillah (dalam Rohman, 2018: 91-92) tahapan-tahapan tersebut adalah: a) menetapkan tujuan, b) menentukan keadaan sesuai kondisi saat ini, c) menentukan dan menetapkan faktor pendukung dan penghambat, dan d) mengembangkan rencana dan menjelaskannya.

Berbeda dengan tahapan yang disusun oleh Atoillah, Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 107) menyusun tahapan dari: a) membuat kebijakan, tujuan, dan standard, b) mengembangkan aturan dan prosedur, c) mengembangkan rencana, d) melakukan ramalan, e) menganalisis lingkungan, dan f) mengevaluasi efektivitas proses perencanaan.

b. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian adalah proses penyesuaian struktur organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan, lingkungan dan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Proses pengorganisasian memiliki serangkaian tahapan yang perlu dilakukan. Menurut Herujito (dalam Rohman, 2018: 101-103) tahapan tersebut terbagi atas: a) perumusan tujuan organisasi yang jelas, b) pembagian pekerjaan, c) pembagian kekuasaan, d) pengawasan, e) intensitas kekuasaan, dan f) sinergitas perintah dan tanggung jawab.

Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 107) menjelaskan proses organisasi dibagi menjadi beberapa tahap: a) Menugaskan semua orang untuk andil dalam pekerjaan; b) Menetapkan struktur yang dapat bekerja sesuai fungsional dan sosial; c) Mendelegasikan wewenang; d) Menetapkan otoritas dan saluran komunikasi; e) Mengkoordinasikan semua bawahan Bekerja; dan f) mengevaluasi efektivitas proses organisasi.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses pelaksanaan rencana yang telah disusun sejak awal sesuai kondisi riil dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki agar tujuan yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana secara optimal. Menurut Rohman (2018:37) dalam pelaksanaan suatu rencana dibutuhkan faktor kepemimpinan (*leadership*). Kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan karena menjadi kekuatan yang dapat menggerakkan sumber daya yang terlibat. Selain faktor kepemimpinan, Sukarna (2011:82-83) menambahkan faktor lain seperti: a) sikap, b) komunikasi, c) insentif, d) supervisi, dan e) disiplin.

d. Pengawasan

Pengawasan berkenaan dengan proses pengukuran hasil kerja. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh diperlukan guna menghindari hal-hal yang menyimpang dari rencana dan tujuan. Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengawasan berperan penting dalam setiap manajemen. Karena pengawasan dapat mengontrol dan membantu pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara baik.

Wijayanti (dalam Rohman, 2018: 188-189) dalam proses pengawasan terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni: a) penentuan standard, b) pengukuran penampilan, c) analisis, dan d) tindakan-tindakan perbaikan.

Bertentangan dengan Wijayanti, Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 107) menyebutkan empat langkah yang harus diambil, seperti: a) menetapkan standar, b) melakukan perubahan dalam pencapaian tujuan, c) menetapkan struktur dan proses akuntabilitas, dan d) mengevaluasi kinerja.

1.5.3.3 Unsur-Unsur Manajemen

Untuk menunjang proses manajemen serta agar tujuan dari manajemen khususnya manajemen publik tercapai, diperlukan pemenuhan unsur-unsur manajemen sebagaimana dijelaskan Manullang (2015: 6) sebagai berikut:

a. Manusia

Manusia berperan penting dalam melakukan beberapa kegiatan terutama dalam segi manajemen. Hal itu dikarenakan semua program yang telah terencana dijalankan oleh manusia, dan manajemen tidak akan berhasil tanpa usaha yang dilakukan manusia.

b. Uang

Uang dapat digunakan sebagai sarana manajemen dengan menggunakan uang tersebut sedemikian rupa agar tujuan yang telah ditentukan dicapai dengan baik dan penggunaannya harus efisien.

c. Mesin

Mesin merupakan sebuah alat yang dapat dipergunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen melalui penggunaan teknologi atau alat bantu berupa mesin.

d. Material

Material dalam perspektif manajemen dapat diartikan sebagai bahan baik berupa bahan yang secara mata dapat dilihat maupun data atau informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.

e. Metode

Metode dapat diartikan sebagai cara maupun sarana atau alat yang akan membantu dalam proses manajemen, dalam melaksanakan proses mencapai tujuan harus menggunakan metode yang efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat, agar metode itu tepat sasaran.

1.5.3.4 Paradigma Manajemen Publik

1.5.3.4.1 *Old Public Administration (OPA)*

Mantan presiden Amerika Serikat yang juga merupakan seorang professor ilmu politik di universitas Princeton, Woodrow Wilson (1887-1987), mengusulkan bahwa administrasi publik "menerapkan konstitusi lebih sulit daripada merumuskannya." Kemudian, beliau juga menjelaskan bidang administrasi memiliki kesamaan dengan bidang komersial. Oleh karena itu, Wilson menyarankan agar pemerintah membentuk struktur yang mengikuti model bisnis, yaitu memiliki kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kontrol, hal ini sangat penting untuk membentuk struktur organisasi yang hierarkis, dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara efektif. Kemudian konsep tersebut kita kenal saat ini dengan sebutan *the Old of Public Administration*.

Kerangka *The Old Public Administration* ini dalam catatan sejarahnya mendapat perkembangannya dalam konsep-konsep baru. Salah satu di antaranya timbul konsep rasional model yang dikemukakan oleh Herbert Simon melalui tulisannya tentang *Administrative Behavior* (1957). Demikian juga konsep tentang *public choice*. Adapun mainstream dari ide inti *The Old Public Administration* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah yang berwenang dalam administrasi publik menjadi titik perhatian dari pemerintah.
2. Tujuan yang menyangkut politik berkaitan dengan rancangan kebijakan administrasi publik
3. Upaya implementasi kebijakan publik lebih dominan daripada administrasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.
4. Administrator yang diberikan tanggung jawab kepada pejabat politik dan dekresi tak terbatas dalam menjalankan tugasnya bertugas memberikan pelayanan.
5. Pimpinan dan pejabat politik yang secara demokratis dibipih diawasi oleh para administrator.
6. Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
7. Nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya sangat terbatas.
9. Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgetting*.

Paradigma yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson membutuhkan pemisahan antara pemerintahan dan politik. Paradigma ini menuntut pengelola publik untuk selalu mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomis, sehingga harus diangkat berdasarkan kesesuaian dan keterampilan pekerjaan, bukan berdasarkan keanggotaan atau jabatan partai politik atau jabatan politik manapun.

Kemudian paradigma ini didukung oleh Max Weber dimana Weber berpendapat ketika masyarakat yang telah berkembang akan menjadi semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan suatu institusi yang rasional yaitu birokrasi dengan penerapan perilaku yang impersonal atau rigid untuk menciptakan budaya profesional.

Dalam perkembangannya, paradigma ini kemudian menghadapi berbagai kendala, misalnya Weber menilai bahwa citra organisasi birokrasi sangat ideal, meskipun karakteristiknya dapat menjadi sangat kaku dan kompleks dalam perkembangannya. Pada paradigma ini dapat dilihat untuk membangun birokrasi yang diperlukan profesionalitas penggunaan keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standarisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektivitas.

1.5.3.4.2 *New Public Services (NPS)*

“Paradigma New Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dornhart dan Robert B. Dornhart berjudul *The New Public Service : Serving, not Steering* terbit tahun 2003. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng-*counter* paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma New Public Management yang berprinsip *run government like a business* atau *market as solution to the ills in public sector*.

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep *the New Public Service* (NPS) hal tersebut diharapkan dapat membuat perubahan nyata pada birokrasi pemerintahan sebelumnya. Penerapan konsep ini membutuhkan keberanian dan kemauan instansi pemerintah, karena mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang diberikan oleh konsep ini adalah pemerintah harus mendengarkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meski setelah sekian lama berkuasa secara sewenang-wenang atas masyarakat, tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

NPS memberikan pengajaran yang berharga bahwa pembangunan birokrasi sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Karena masyarakat adalah warga negara dan bukan pelanggan, maka pelayanan harus diberikan secara maksimal, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam setiap proses, strategis dan demokratis, tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku, serta melibatkan dan menghargai masyarakat merupakan suatu hal yang penting.

Penelitian ini sangat berkorelasi dengan sangat NPS. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah inklusif dimana tujuan utamanya adalah mengurangi segregasi antara anak yang normal secara fisik dengan anak

berkebutuhan khusus. Pemerintah melalui sekolah inklusif tidak bisa menganggap keduanya “berbeda” meskipun pendekatan keduanya tidak dipungkiri akan berbeda dalam alat/media.

1.5.4 Manajemen Pendidikan Inklusif

1.5.4.1 Manajemen

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam subbab manajemen publik, istilah manajemen publik yang kemudian secara spesifik ada pada manajemen pendidikan inklusif tidak berbeda jauh secara makna dari pengertian manajemen secara umum. Secara bahasa menurut Usman (2008: 3) manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Dari dua kata tersebut menjadi kata *managere* yang kemudian diadopsi dalam Bahasa Inggris menjadi *manager* yang bertugas melakukan tugas manajemen. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pengelolaan.

Kemudian secara istilah manajemen menurut Wijayanti (dalam Rohman, 2018: 11) melihat manajemen merupakan suatu proses yang saling terkait satu sama lain. Proses tersebut adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar proses tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2006: 49) manajemen merupakan suatu proses pengendalian serta penggunaan semua sumber daya yang tersedia menurut perencanaan tujuanyang sudah disusun agar tercapai tujuan tersebut. Sejalan dengan Atmosudirdjo, Nugroho (dalam Rohman, 2018: 13) berpendapat pengendalian dapat dihubungkan dalam konteks pembahasan kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pendidikan inklusif. Dalam konteksnya, pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan pemberian hukuman (*punishment*).

1.5.4.2 Pendidikan Inklusif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memastikan bahwa semua siswa berkebutuhan khusus memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Meski dapat disatukan, peserta didik yang

memiliki kebutuhan khusus haruslah diberikan kesesuaian fasilitas dan kebutuhan sesuai dengan disabilitas yang dimiliki (Kustawan, 2013: 12).

Ilahi (2013: 26) menjelaskan pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mewajibkan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah terdekat masuk dalam kelas biasa seperti anak-anak pada umumnya. Dengan kata lain, penyelenggara pendidikan inklusif menerima semua peserta didik di kelas yang sama. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif haruslah menyediakan program pendidikan yang relevan, menginspirasi, namun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik, dengan dukungan yang dapat diberikan guru untuk membantu keberhasilan mereka.

Apabila dilihat dalam kerangka kebijakan publik, pendidikan inklusif dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik distributif. James Anderson (dalam Taufiqurokhan 2014:05) menjelaskan kebijakan distributif menyangkut penyaluran pelayanan atau kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara nyata baik masyarakat atau individu. Yang dimaksud kebijakan bisa juga mengkhususkan diri kepada kelompok masyarakat tertentu yang kurang mampu agar mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan masyarakat lain. Manifestasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenis distributif ini tertuang pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang “Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.”

Menurut Staub dan Peck (dalam Kristiawati, 2016: 6), pendidikan inklusif didefinisikan sebagai integrasi penuh anak-anak penyandang disabilitas ringan, sedang, dan berat ke dalam kelas reguler. Sementara itu, dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada semua siswa penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran bagi semua siswa yang memiliki potensi intelektual atau bakat berkemampuan khusus. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa lain di sekolah secara reguler.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pendidikan inklusif adalah perkembangan baru dalam pendidikan terpadu. Sekolah inklusif memberikan upaya terbaik bagi setiap siswa untuk melakukan perubahan atau penyesuaian, mulai dari perangkat pembelajaran, usaha, fasilitas, tenaga kependidikan, hingga sistem pembelajaran dan penilaian, untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Tidak ada perbedaan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya, semua mendapat

perlakuan yang sama di sekolah, kecuali siswa berkebutuhan khusus harus mendapat guru pengawas khusus atau biasa disebut dengan GPK.

1.5.4.3 Perencanaan Sekolah Inklusif

Proses perencanaan sekolah inklusif merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah kedepannya dengan menentukan dan menempatkan sumber daya yang tersedia. Kustawan (2013: 95-146) menjelaskan beberapa komponen yang diperlukan dalam perencanaan sekolah inklusif, yakni: a) merancang kurikulum fleksibel, b) merancang bahan ajar yang fleksibel, dan c) penyediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas setting pendidikan inklusif.

Kurikulum yang berlaku di sekolah inklusif secara umum menggunakan kurikulum reguler yang diberlakukan selayaknya kurikulum di sekolah umum. Hanya saja, kurikulum tersebut perlu penyesuaian dengan keadaan peserta didik yang memiliki hambatan yang bervariasi.

Prinsip yang dikemukakan Kustawan (2013: 96-97) dalam mengembangkan kurikulum yang fleksibel sebagai lingkungan pendidikan inklusif, guru harus mengacu pada hal-hal berikut untuk siswa berkebutuhan khusus (PDBK): (1) Biasanya perlu mengubah atau memodifikasi kurikulum umum yang berlaku bagi siswa untuk menyesuaikan dengan kondisi PDBK, (2) Pada komponen tujuan, materi, proses dan/atau evaluasi, kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi GDPK. (3) Penyusunan mata kuliah tiap komponen tidak harus sama, (4) Proses penyampaian tidak harus sama di semua materi, (5) Untuk semua tema, proses modifikasinya berbeda, dan (6) Untuk setiap jenis pengecualian GDPK, proses modifikasinya juga berbeda.

Bahan ajar juga perlu mengalami modifikasi karena bahan ajar memiliki posisi yang strategis dalam proses pembelajaran. Keterangan, uraian, dan informasi yang disampaikan mesti dituangkan dalam sebuah bahan ajar. Kustawan (2013: 103) menjelaskan beberapa prinsip yang digunakan dalam modifikasi bahan ajar sebagai berikut: a) materi pelajaran dimodifikasi apabila tujuan dimodifikasi, b) tidak semua materi dimodifikasi, c) PDBK yang memiliki hambatan kecerdasan paling banyak membutuhkan modifikasi pelajaran, d) semakin bersifat abstrak suatu pelajaran semakin perlu dimodifikasi, dan e) perlu asesmen untuk mengukur kemampuan peserta didik.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan pelaksanaan pendidikan

inklusif yang efektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agar sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah inklusif harus memberikan sarana yang aksesibel bagi setiap siswa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Menurut Kustawan (2013: 137-147) komponen aksesibilitas terdiri dari dua jenis, yakni: aksesibilitas non fisik dan aksesibilitas fisik.

1. Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas non fisik memiliki keterkaitan dengan sistem agar setiap orang dapat menikmati akses fasilitas yang sama. Aksesibilitas tersebut dapat berupa aturan-aturan atau prosedur yang menjamin partisipasi penuh peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam pendidikan/kegiatan persekolahan, adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, serta layanan administrasi. Jenis pelayanan dari aksesibilitas ini dapat berupa: suara, bunyi, dan tulisan yang melekat dengan aksesibilitas fisik.

2. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik dapat dikatakan sebagai fasilitas yang memudahkan setiap orang agar dapat masuk ataupun keluar pada suatu fasilitas seperti bangunan atau area tersebut. Untuk mendukung pendidikan inklusif, aksesibilitas fisik ini harus melakukan adaptasi agar kegiatan pendidikan inklusif dapat berjalan lancar. Berdasarkan Toolkit LIRP UNESCO (dalam Kustawan, 2013: 140-147) indikator aksesibilitas fisik, yakni : a) Jalan menuju sekolah, halaman sekolah, pembangunan ramp, dan jalur pemandu berukuran 1,6 m, b) Pintu ruang kelas ukuran 160 cm, c) Jendela model geser, d) Koridor kelas minimal ukuran 160 cm, e) Ruang kelas memberi ruang gerak yang luas, f) Perpustakaan dan laboratorium raknya mudah dijangkau, g) Ruang konseling terjaga kerahasiaannya, i) Arena olahraga dan bermain dibuat rata, j) Toilet memiliki lebar pintu 125 cm dan memakai model geser, dan k) Tanda-Tanda khusus sekolah.

1.5.4.4 Pengorganisasian Sekolah Inklusif

Dalam melaksanakan pendidikan inklusif perlu melakukan beberapa pengorganisasian agar bisa terlaksana dengan baik. Menurut Ilahi (2013:165-187)

sedikitnya komponen yang perlu dilihat, yakni: a) penyelenggaraan dan pengembangan sekolah inklusif, b) menyiapkan sumber daya, c) membagi tugas dan peran guru, dan d) kerjasama dengan pihak lain.

Proses penyelenggaraan dan pengembangan sekolah inklusif dituangkan dalam sebuah perencanaan yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah serta stakeholder lainnya yang menghasilkan Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, rencana kerja jangka pendek/ tahunan, rencana kegiatan sekolah, dan kurikulum.

Komite sekolah merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah ke masyarakat. Oleh karena itu, sekolah melalui komite bekerja sama dengan akuntan publik guna mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada masyarakat.

Mempersiapkan sumber daya berupa tenaga pendidik dapat dilakukan dengan mengadakan suatu pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yayasan penyelenggara dengan dibantu pemerintah pusat atau provinsi melalui direktorat pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK). Pelatihan dapat diselenggarakan juga oleh sekolah sebagai percepatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara *in house training*.

Sekolah inklusif seharusnya memiliki tenaga kependidikan yang memiliki pendidikan khusus atau pendidikan tinggi pada pendidikan khusus, minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1). Selain guru dengan kualifikasi tersebut, diperlukan juga Guru pembimbing khusus (GPK) yang bisa direkrut dari sekolah luar biasa (SLB). Untuk memenuhi kebutuhan ABK perlu juga direkrut guru bimbingan dan konseling yang memang memiliki kualifikasi di bidangnya.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah atau stakeholder yang terkait baik dengan kelompok kerja pendidikan inklusif kabupaten/kota/provinsi, lembaga pendidikan lain seperti sekolah luar biasa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan.

1.5.4.5 Pelaksanaan Sekolah Inklusif

Menurut Kustawan (2013: 133-152) proses pelaksanaan sekolah inklusif dapat dilihat kegiatannya seperti: a) melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan

karakteristik peserta didik, dan b) penyesuaian penilaian proses dan hasil belajar bagi PDBK.

Pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan proses adaptasi dengan melihat kondisi dan kebutuhan peserta didik. Guru dalam hal ini memiliki tanggung jawab mengajar setiap peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran dalam lingkungan pendidikan inklusif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: a) guru memahami karakteristik dan kemampuan siswa, b) tujuan pembelajaran yang sederhana dan efektif serta efektif, dan c) penugasan yang diberikan lebih praktis.

Selain dalam proses pembelajaran, proses penilaian perlu diperhatikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Maka, proses penilaian hasil pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. Penyesuaian waktu, setiap siswa berkebutuhan khusus membutuhkan waktu ekstra untuk mengikuti ujian dan tugas lain yang berkaitan dengan evaluasi hasil proses pembelajaran.
2. Penyesuaian cara, adalah melakukan modifikasi cara dilakukan pengajar dengan memintas siswa mengikuti ujian dan tugas lain yang berkaitan dengan evaluasi hasil proses pembelajaran.
3. Penyesuaian materi, adalah penyesuaian tingkat kesulitan bahan ujian atau tugas lain dan pemakaian bahasa dalam setiap nomor soal untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

1.5.4.6 Evaluasi Manajemen Pendidikan Inklusif

Setelah melaksanakan kegiatan pendidikan inklusif yang telah direncanakan di awal, sekolah hendaknya melaksanakan satu kegiatan fungsi manajemen lagi yakni evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Kustawan (2013: 155) menjelaskan bentuk evaluasi tersebut adalah monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

1. Monitoring, adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah guna memantau pelaksanaan kegiatan inklusif saat dilaksanakan, menilai hasil dari tujuan, dan melihat faktor kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sekolah inklusif di sekolahnya. Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Data tersebut nantinya akan jadi bahan masukan guna melakukan perbaikan.
2. Evaluasi, adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi

sekolah inklusif. Evaluasi dilaksanakan untuk melihat kekuatan, kekurangan, dan ancaman yang dialami sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk melakukan perbandingan keadaan sekolah penyelenggara dengan tujuan yang semula telah ditetapkan. Seluruh rangkaian evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

3. Laporan, adalah penyajian hasil monitoring yang telah dilakukan oleh kepala sekolah untuk kemudian diberikan dengan pihak terkait.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Manajemen Pendidikan Inklusif merupakan rangkaian proses pengelolaan pendidikan inklusif yang dimulai dari dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena dapat diartikan sebagai gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena penelitian yang akan diamati meliputi gejala yang tampak dari kebijakan pendidikan inklusif yang telah diimplementasikan di SMPN 4 Mojosoong Boyolali Boyolali sebagai berikut.

1. Perencanaan Pendidikan Inklusif
 - a. Perencanaan kurikulum khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
 - 1) Penyusunan dan penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan sekolah;
 - 2) Proses modifikasi di setiap mata pelajaran;
 - 3) Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum.
 - b. Perencanaan bahan ajar khusus siswa berkebutuhan khusus.
 - 1) Tujuan mata pelajaran yang dilakukan modifikasi;
 - 2) Penyesuaian bahan ajar sesuai kebutuhan;
Proses modifikasi bahan ajar;
 - 3) Hambatan dalam pelaksanaan bahan ajar.
 - c. Perencanaan sarana dan prasarana untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
 - 1) Ketersediaan aksesibilitas non fisik.
 - 2) Ketersediaan aksesibilitas fisik.
2. Pengorganisasian Pendidikan Inklusif
 - a. Pertanggungjawaban.

- 1) Pertanggungjawaban oleh kepala sekolah dan komite sekolah;
 - 2) Pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Pelatihan.
 - 1) Pelatihan yang diselenggarakan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah;
 - c. Sumber daya guru.
 - 1) Guru dengan kualifikasi S1/D4 dari program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa;
 - 2) Ketersediaan guru pendidikan khusus.
 - d. Kerjasama.
 - 1) Kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi;
 - 3) Kerjasama dengan masyarakat
3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif
- a. Proses pembelajaran oleh guru disesuaikan dengan siswa.
 - 1) Pemahaman guru terhadap karakteristik siswa.
 - 2) Penyederhanaan tujuan pembelajaran.
 - 3) Penyederhanaan tugas-tugas peserta didik berkebutuhan khusus.
 - b. Penyesuaian penilaian hasil belajar kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
 - 1) Penyesuaian waktu.
 - 2) Penyesuaian cara.
 - 3) Penyesuaian materi.
4. Evaluasi Pendidikan Inklusif
- a. Proses Monitoring oleh kepala sekolah.
 - 1) Pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Ketercapaian tujuan.
 - 3) Faktor pendukung.
 - 4) Faktor penghambat.
 - b. Proses Evaluasi oleh sekolah.
 - 1) Kekuatan proses pelaksanaan.
 - 2) Kekurangan proses pelaksanaan.
 - 3) Ancaman pendidikan inklusif di sekolah.
 - 4) Perbandingan dengan tujuan.

- c. Penyusunan laporan oleh kepala sekolah.
- 1) Proses penyusunan laporan dan pertanggungjawaban.

Tabel 1.3
Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Indikator	Aspek
1.	Perencanaan	Kurikulum	a. Penyusunan dan penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan sekolah; b. Proses modifikasi di setiap mata pelajaran; c. Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum.
		Bahan Ajar	a. Tujuan mata pelajaran yang dilakukan modifikasi; b. Proses Modifikasi dan Penyesuaian bahan ajar sesuai kebutuhan; c. Hambatan dalam pelaksanaan bahan ajar.

		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan aksesibilitas non fisik; b. Ketersediaan aksesibilitas fisik.
2.	Pengorganisasian	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanggungjawaban oleh kepala sekolah dan komite sekolah. b. Pertanggungjawaban keuangan.
		Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pelatihan oleh dinas kabupaten provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
		Sumber Daya Guru	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya guru lulusan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. b. Tersedianya guru pembimbing khusus (GURU PEMBIMBING KHUSUS).
		Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan seluruh stakeholder;
3.	Pelaksanaan	Penyesuaian Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. b. Penyederhanaan tujuan pembelajaran. c. Penyederhanaan tugas-tugas peserta didik berkebutuhan khusus.

		Penyesuaian Proses Penilaian	a. Penyesuaian waktu, cara, dan materi.
4.	Evaluasi	Monitoring	a. Pelaksanaan kegiatan; b. Ketercapaian tujuan; c. Faktor pendukung dan penghambat.
		Evaluasi	a. Kekuatan dan kekurangan proses pelaksanaan. b. Ancaman pendidikan inklusif di sekolah. c. Perbandingan dengan tujuan.
		Pelaporan	a. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban..

1.8 Argumen Penelitian

Analisis manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali merupakan fokus utama penulis dalam menyusun penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, penulis memiliki argumentasi awal dengan menjabarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Rumusan masalah yang dibangun adalah bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali. Argumentasi penelitian ini dibangun berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pengamatan pada perencanaan akan membahas aspek penyusunan kurikulum, bahan ajar, dan penyediaan sarana dan prasarana. Menurut Kustawan (2013: 97), dari segi isi, kurikulum dilakukan modifikasi disamping kurikulum reguler untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi dari isi tersebut harus sesuai kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus yang mengacu pada penilaian awal. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 7 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa bahwa, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa berkebutuhan khusus juga sama dengan kurikulum, harus mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan sedikit tingkat kesulitannya apabila ada siswa lambat belajar di sekolah. Ilahi (2013: 173-174) menjelaskan prinsip strategi pembelajaran dalam penerapan bahan ajar yang telah dimodifikasi, yakni: (1) Perencanaan pembelajaran pertama kali dilakukan penilaian yang dilakukan secara bersama oleh guru umum dengan guru pembimbing khusus. (2) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode kooperatif dan partisipatif. Dengan kata lain, pembelajaran dilaksanakan dengan memberi kesempatan bagi seluruh siswa untuk belajar sesuai dengan caranya masing-masing yang diiringi dengan pembagian tugas antara guru umum dengan guru pembimbing khusus.

Sarana dan prasarana juga hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar siswa berkebutuhan khusus. Penyediaan sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus mudah diakses untuk seluruh siswa, tidak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kustawan (2013: 138) menjelaskan sarana dan prasarana yang dibutuhkan menyangkut aksesibilitas non fisik dan aksesibilitas fisik.

Aksesibilitas non fisik dapat diartikan sebagai akses yang disediakan berwujud program maupun sistem yang semua orang dapat masuk dan keluar dengan mudah dari program atau sistem tersebut. Sementara aksesibilitas fisik merupakan wujud fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk masuk dan keluar pada lingkungan atau bangunan tertentu. Aksesibilitas yang harus disediakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sudah memiliki standar sendiri. Toolkit LIRP UNESCO (dalam Kustawan, 2013: 10-147) menerapkan standar untuk aksesibilitas fisik sebagai berikut: (1) jalan lingkungan sekolah selebar 1,6 m, (2) ukuran pintu ruang kelas selebar 160 cm, (3) jendela model geser, dan (4) barisan dalam ruang kelas harus memberi ruang gerak yang besar.

Aspek pengorganisasian penulis akan membahas pelaksanaan pertanggungjawaban, penyelenggaraan pelatihan untuk guru, ketersediaan guru pembimbing khusus, dan terciptanya kerjasama antara sekolah inklusif dengan lembaga lain. Menurut Ilahi (2013:165) pertanggungjawaban sekolah penyelenggara pendidikan inklusif didasarkan pada perencanaan yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah serta stakeholder lainnya yang menghasilkan Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, rencana kerja jangka

pendek/ tahunan, rencana kegiatan sekolah, dan kurikulum. Selain itu, komite sekolah merupakan bentuk tanggung jawab dengan menjembatani pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah melalui komite bekerja sama dengan akuntan publik guna mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan pun tidak luput dalam permasalahan.

Pelatihan (dalam Kustawan, 2013: 120-122) dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun secara *in house training* yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dilakukan melalui Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan juga diadakan oleh Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Perguruan Tinggi. Sementara pelatihan secara *in house training* dilaksanakan oleh sekolah dengan menghadirkan pemateri yang dapat dipilih dari dosen perguruan tinggi.

Kustawan (2013: 124) menjelaskan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang memiliki pendidikan khusus atau pendidikan tinggi pada pendidikan khusus, minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1). Selain guru dengan kualifikasi tersebut, diperlukan juga Guru pembimbing khusus (GPK) yang bisa direkrut dari sekolah luar biasa (SLB). Untuk memenuhi kebutuhan ABK perlu juga direkrut guru bimbingan dan konseling yang memang memiliki kualifikasi di bidangnya.

Kerjasama dilakukan agar terjadi kelanjutan penyelenggaraan sekolah inklusif baik dari segi moral, teknis, dan finansial. Menurut Kustawan (2013: 154-155) kerjasama dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, kerjasama dengan instansi lain dan kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keilmuan yang serupa, misalnya dengan sekolah luar biasa (SLB) ataupun perguruan tinggi.

Pelaksanaan akan fokus mengamati indikator pelaksanaan proses pembelajaran dan proses penilaian. Kustawan (2013: 151-153) menjelaskan proses penilaian hasil pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus meliputi beberapa aspek sebagai berikut: (1) Penyesuaian waktu, setiap siswa berkebutuhan khusus membutuhkan waktu ekstra untuk mengikuti ujian dan tugas lain yang berkaitan dengan evaluasi hasil proses pembelajaran. (2) Penyesuaian cara, adalah melakukan modifikasi cara dilakukan pengajar dengan memintas siswa mengikuti ujian dan tugas lain yang berkaitan dengan evaluasi hasil proses pembelajaran. (3) Penyesuaian materi, adalah penyesuaian tingkat kesulitan bahan

ujian atau tugas lain dan pemakaian bahasa dalam setiap nomor soal untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Proses evaluasi fokus membahas indikator evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Kustawan (2013: 155) menjelaskan bentuk evaluasi tersebut adalah monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Monitoring merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah guna memantau pelaksanaan kegiatan inklusif saat dilaksanakan, menilai hasil dari tujuan, dan melihat faktor kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sekolah inklusif di sekolahnya. Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Data tersebut nantinya akan jadi bahan masukan guna melakukan perbaikan.

Evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi sekolah inklusif. Evaluasi dilaksanakan untuk melihat kekuatan, kekurangan, dan ancaman yang dialami sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk melakukan perbandingan keadaan sekolah penyelenggara dengan tujuan yang semula telah ditetapkan. Seluruh rangkaian evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Laporan adalah penyajian hasil monitoring yang telah dilakukan oleh kepala sekolah untuk kemudian diberikan dengan pihak terkait.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Singarimbun & Effendi (2006:4) menjelaskan bahwa penelitian umumnya tergolong dalam tiga jenis, yaitu penelitian penjajagan (eksploratif) memiliki sifat yang terbuks dsn brlum memiliki hipotesis, penelitian penjelasan (eksplanatori) menyorot korelasi antara variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang sudh dirumuskan, serta penelitian deskriptif yang brtujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sarana fisik atau frekuensi terjadinya aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikannya secara tertentu.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan program penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku dalam bahasa tertulis atau lisan, dan dapat menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk observasi.

Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang objek observasi atau keadaan objek observasi tersebut. Ini mencoba untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisa dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penelitian tidak menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan informasi sesuai dengan variabel yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan metode lain berupa studi kasus. Sesuai dengan uraian Robert K Yin (2010: 1-15), studi kasus digunakan merinci dan menelaah secara mendalam tentang seseorang, kelompok, sebuah program, atau suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali sehingga lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian yaitu Kabupaten Boyolali dan situs penelitian di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali.

1.9.3 Subyek Penelitian

Penelitian ini memilih subyek yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran secara baik tentang informasi apa saja yang subjek ketahui tentang sebuah fenomena atau kasus yang sedang diteliti, dengan kata lain subjek dapat disebut juga sebagai informan, atau orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Informan dapat ditemukan melalui berbagai usaha, di antaranya: Pertama, keterangan dari pihak yang berwenang yang disesuaikan dengan topic penelitian. Dalam hal ini, pihak berwenang dapat berupa pihak formal dari institusi pemerintahan maupun informal. Lebih lanjut, dalam penelitian ini yang termasuk pihak formal adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, sedangkan pihak informal adalah siswa di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali. Usaha yang kedua melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Proses pemilihan informan akan menggunakan teknik *snowball*, *purposive*, dan *accidental*. *Snowball* merupakan teknik pengambilan data yang akan terus bergulir seperti bola salju sehingga semakin besar. Begitu pula yang diharapkan dari proses

pemilihan informan akan terus dilakukan untuk mencari informan berkualitas yang dapat memberikan informasi secara detail. Teknik ini memerlukan informan utama (Key Informant) secara bertahap dari Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Mojosongo Boyolali dan Guru SMPN 4 Mojosongo Boyolali.

Purposive sampling, sampel sumber data diambil dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini adalah dengan memilih informan yang dianggap paling mengerti tentang isu atau kasus yang sedang diteliti, atau dapat juga inform tersebut adalah penguasa, sehingga peneliti secara mudah mengeksplorasi objek atau situasi yang diteliti. Informan teknik ini memerlukan guru di SMPN 4 Mojosongo Boyolali baik yang sudah berpengalaman mengajar di kelas inklusif maupun yang baru.

Selanjutnya adalah teknik *accidental*. Teknik ini digunakan untuk memilih seseorang sebagai informan karena ketidaksengajaan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling karena peneliti tidak mengetahui banyak tentang populasi penelitian.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua (dalam Marzuki, 2000: 55), yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber, diamati dan dicatat melalui pertanyaan-pertanyaan dari responden dalam wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang ada di SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder adalah sumber yang tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, literatur, koran, brosur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut jenis penelitian tersebut, maka penulis memilih menggunakan tipe data primer. Jenis data ini merupakan alat penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku dalam bahasa tertulis atau lisan, dan dapat diamati dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Jenis data primer juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang objek yang diamati atau keadaan objek tersebut. Di dalamnya mencoba untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisa dan menjelaskan apa yang sedang terjadi.

Penelitian tidak menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan informasi sesuai dengan variabel yang diteliti.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi sumber data utama adalah ujaran dan tindakan, selebihnya dokumen dan berkas lainnya dijadikan sebagai pendukung sumber utama (Lofland dalam Moleong, 2008). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah ujaran yang diberikan oleh informan, selanjutnya sumber data tertulis seperti dokumen, statistic, dan foto menjadi sumber pendukung.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengikuti teknik pengumpulan data dari (Afifuddin, 2009):

a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan keteangan secara langsung melalui lisan, dapat berupa percakapan atau tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian agar mendapatkan data dan keterangan yang lebih valid.

c. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Cara memperoleh data melalui studi pustaka dengan membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2008:21) adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan pengetahuan dan hal penting yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat disampaikan dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara bersama dengan proses pengumpulan data (koleksi data). Menurut Milles dan Huberman (Afrizal, 2014) terdapat tiga tahap analisis data yang dijabarkan secara sistematis melalui bagan berikut:

1.9.7.1 Reduksi Data

Tahap ini merupakan tahap merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu dengan memberikan tanda-tanda (kode). Membuat kode fenomena yang sama secara konsisten saat menganalisis rekaman di tempat. Koding akan memudahkan peneliti mengidentifikasi fenomena, memperoleh kecenderungan berdasarkan frekuensi kode dan penyusunan kategori.

1.9.7.2 Penyajian Data

Tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian baik dalam bentuk tabel, grafik, matrik, maupun diagram. Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014:50) menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram karena dinilai lebih efektif. Sajian data dalam bentuk-bentuk tersebut digunakan agar data yang semakin banyak terkumpul dapat berlanjut ke tahap kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Koding

Saat menganalisis wawancara atau catatan lapangan, selalu berikan kode untuk fenomena yang sama. Pengkodean ini memudahkan peneliti dengan cara-cara berikut:

- a. Memberikan kemudahan dalam mengamati fenomena.
- b. Memudahkan perhitungan intensitas kemunculan fenomena.
- c. Frekuensi kode menunjukkan kecenderungan temuan.
- d. Membantu penyusunan kategori.

2. Kategorisasi

Kategorisasi atau klasifikasi mengacu pada pengaturan kategori. Kategori hanyalah sekumpulan yang diatur menurut ide, intuisi, atau beberapa kriteria.

3. Penafsiran data

Dalam penafsiran data, tujuan yang harus dicapai adalah deskripsi mentah, deskripsi analitik, atau teori substantif. Penafsiran data dalam penelitian ini bertujuan

mendapatkan teori baru yang dapat diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan.

1.9.7.3 Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara yang atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian memeriksa kembali kesahihan interpretasi dengan cara memeriksa ulang proses coding dan penyajian data di tahap sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

Setelah ketiga tahap dilakukan maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap hasil wawancara mendalam yang nanti akan dilakukan dan juga dari dokumen pendukung lainnya.

1.9.8 Kualitas Data

Agar mendapat kualitas data yang baik, sebuah penelitian tidak ditentukan dengan banyaknya informan, namun ditentukan melalui kesesuaian data yang terkumpul. Agar menghasilkan kualitas data yang baik, menurut Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337), pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban belum memuaskan, maka peneliti harus memberikan pertanyaan lagi agar data yang diperoleh kredibel.

Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data valid adalah teknik triangulasi. Triangulasi ini diperlukan guna mencapai suatu keabsahan konstruk (*construct validity*). Menurut Afifuddin (2009) informasi hendaknya dicari dari berbagai sumber agar tidak bias sehingga data yang didapat benar-benar dapat diukur dengan variabel yang diinginkan. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus-menerus sampai peneliti puas dan yakin dengan kualitas datanya.

Menurut Patton (dalam Afifuddin, 2009:143) ada empat macam triangulasi yang dapat digunakan untuk mencapai suatu keabsahan, yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi pengamat, adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
3. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.
4. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi.

Sesuai dengan pernyataan Patton tersebut teknik triangulasi dapat dicapai dengan beberapa cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.